

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini masih merupakan negara berkembang yang memiliki dinamika yang kompleks di dalam kehidupan masyarakatnya. Kondisi tersebut tentu merupakan pekerjaan rumah bersama bagi seluruh komponen bangsa guna memperbaiki keadaan dan situasi tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang, khususnya di tengah masyarakat baik dalam perspektif sumber daya manusia (SDM) maupun dalam perspektif fisik (infrastruktur).

Berdasarkan perspektif para pakar mengenai kualitas sumber daya manusia lebih memiliki urgensi yang vital ketimbang mengenai kuantitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Terlihat bahwa di Indonesia jumlah penduduknya merupakan yang keempat terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, pembangunan

hendaknya berpusat pada sumber daya manusia dalam mencapai tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan sumber daya manusia dalam mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan sumber daya manusia adalah bagaimana meningkatkan kompetensi setiap individu sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.<sup>1</sup>

Pemberdayaan terhadap manusia melalui penanggulangan bencana alam merupakan salah satu mekanisme untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dalam menghadapi bencana alam. Melalui penanggulangan bencana alam, masyarakat akan diberikan modal berupa pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan sehingga masyarakat dapat melakukan hal-hal yang mampu meningkatkan kualitas hidup untuk mewujudkan suatu pembangunan bangsa yang komprehensif dan holistik. Pemberdayaan melalui penanggulangan bencana alam

---

<sup>1</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 11.

menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Salah satu bentuk edukasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman bahwa pencemaran lingkungan yang merupakan salah satu akibat dari subsidi energi yang dimasukkan oleh manusia ke dalam lingkungan buaatannya.<sup>2</sup> Untuk itu, sebagai makhluk yang berakal, sudah sepantasnya kita sebagai manusia turut menjaga lingkungan agar tidak tercemar dan mengakibatkan timbulnya suatu bencana.

Kapasitas daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan guna pengurangan risiko terjadinya bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 342.

Bencana, serta turunan aturannya (Indonesia, 2007). Kapasitas daerah harus melihat kepada tatanan pada skala internasional (Indonesia, 2008). Komprehensivitas arah kebijakan pembangunan kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana.<sup>3</sup>

Aspek penanggulangan bencana alam merupakan amanat undang-undang yang memiliki urgensi vital dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa” suatu sinyalemen bahwa salah satu tugas negara adalah memberikan akses penanggulangan bencana alam yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara baik melalui mekanisme formal maupun informal. Krisis multidimensi yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya mengenai krisis ekonomi, melainkan juga krisis pada sistem penanggulangan bencana alam akibat sistem pemerintahan dan agrarian tidak mampu

---

<sup>3</sup>Amni Zakasyi Rahman, “Kapasitas Daerah Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor”, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 6 No. 1 (Februari-Agustus 2017), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, h. 1.

memberikan hasil positif dalam reformasi sistem penanggulangan bencana alam.<sup>4</sup>

Penanggulangan bencana alam dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan penanggulangan bencana alam. Akan terjadi perubahan perilaku pada masyarakat apabila ia menempun proses penanggulangan bencana alam, yang awalnya tidak tahu menjadi mengerti, yang awalnya tidak beradab mampu untuk bersikap secara sopan dan baik dan yang awalnya tidak memiliki keahlian menjadi ahli di bidangnya. Selain itu, masyarakat yang telah dibekali dalam proses penanggulangan bencana alam cenderung untuk lebih partisipatif terhadap kondisi di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat di daerah bencana diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat baik sebelum bencana (pra), pada saat bencana

---

<sup>4</sup>Fikri Dzulkarnain, “Peran Yayasan Griya Yatim Dan Dhuafa Dalam Pemberdayaan Kaum Dhuafa Melalui Pendidikan Keterampilan di Bekasi”, (Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 2.

terjadi (*during*) dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi (*pasca*).<sup>5</sup>

Melakukan pemberdayaan masyarakat sama saja dengan berinvestasi pada masyarakat itu sendiri, khususnya dalam konteks pemberdayaan pada masyarakat miskin atau kurang mampu. Menurut Anwas, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri.<sup>6</sup> Suatu pemberdayaan merujuk pada situasi dan pencapaian atas tujuan-tujuan guna melakukan suatu perubahan sosial, yakni masyarakat yang memiliki daya guna, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dapat berguna bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat baik yang bersifat finansial, fisik, psikologi, maupun sosial seperti memiliki rasa optimisme, mampu menyampaikan gagasan atau ide, memiliki pekerjaan, turut

---

<sup>5</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 136.

<sup>6</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 3.

serta dalam aktivitas sosial dan independen dalam dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.<sup>7</sup>

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi fokus dalam proses pembangunan di berbagai negara, terutama negara berkembang. Dampak kemiskinan yang kian melanda dan menggerogoti kehidupan manusia akibat kondisi internasional yang tidak stabil serta proses-proses restrukturisasi agen-agen nasional dan internasional serta peran negara setempat dalam menunjukkan fokus perhatiannya terhadap strategi masyarakat sebagai fasilitas dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penekanan mengenai peningkatan atas pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali dengan proses pemberdayaan masyarakat lokal.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang.<sup>8</sup> Kemiskinan selalu dapat menarik atensi dari

---

<sup>7</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014), h. 60.

<sup>8</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, h. 131.

berbagai pihak baik para praktisi maupun para akademisi. Persoalan yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah perekonomian yang lemah.<sup>9</sup> Kemiskinan terjadi bukan karena faktor irasionalitas masyarakat saja, atau akibat pewarisan budaya “miskin” di tengah kalangan masyarakat (*the culture of poverty*) atau karena masyarakat memiliki kekurangan dalam hal motivasi untuk berprestasi, berwiraswasta atau bahkan karena tidak memiliki etos kerja yang baik. Masyarakat miskin atau yang biasa disebut dengan *dhuafa* yang ada di Indonesia merupakan bagian tersendiri dalam komponen masyarakat yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan masyarakat lainnya, hal ini tentu tidak dapat digeneralisasikan begitu saja.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Kemiskinan sebagai masalah bangsa yang kompleks dan multidimesi, dimana kemiskinan tidak terbatas pada ketidakmampuan secara

---

<sup>9</sup>Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 86.



ekonomi, melainkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada fenomena yang mencuat dalam deskripsi yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu upaya untuk sadar dari segolongan masyarakat yang memiliki kepedulian akan suatu kesejahteraan masyarakat bagi mereka yang kurang beruntung keadaannya dengan membentuk suatu organisasi yang disebut yayasan. Dalam konteks ini, yayasan memiliki peran yakni sebagai

---

<sup>10</sup>Muhammad Syafar, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan (Kajian Implementasi Masyarakat Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat)", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 (April-Oktober 2018), Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 19.

wadah bagi solusi guna menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam deskripsi sebelumnya serta mekanisme untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh yayasan adalah menyelenggarakan aktivitas penanggulangan bencana alam, kesehatan, bantuan hukum maupun keterampilan dan lain sebagainya. Kondisi tersebut tentu mengacu pada *concern* yang hendak difokuskan oleh lembaga yayasan tersebut dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Namun demikian, konteks dalam deskripsi tersebut tidak dapat hanya dijadikan sebagai suatu konsep atau pemikiran saja, terlebih bukan dijadikan sebagai syarat asal (permulaan), maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan.<sup>11</sup>

Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa* merupakan salah satu lembaga sosial non-profit yang menjadi penghubung kepedulian masyarakat mampu atau dermawan dengan anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* guna meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>11</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 27.

mereka melalui penanggulangan bencana alam, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan tokoh agama dan *aqiqah*. Sasaran yang hendak dituju oleh lembaga ini adalah memberdayakan anak-anak yatim dan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah (*dhuafa*). Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga sosial yang saat ini terdepan dalam mewujudkan masa depan dari anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* di Indonesia.

Aktivitas operasional Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* sangat bergantung pada donasi yang diberikan oleh para dermawan guna memenuhi segala kebutuhan bagi anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* di seluruh Indonesia. Saat ini memang jangkauan yang dapat dicapai oleh yayasan ini adalah di 11 provinsi dengan 35 asrama dan 7 jaringan. Artinya, untuk suatu lembaga sosial yang baru berdiri selama 10 tahun, Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* memiliki progres yang menjanjikan dalam mengemban misi sosial bagi golongan yang kurang beruntung dalam menghadapi bencana

alam, baik sebelum terjadi, ketika terjadi dan setelah terjadinya bencana alam tersebut. Sehingga proses rehabilitasi pasca terjadinya bencana alam dapat berlangsung secara lebih baik.

Untuk mengetahui seberapa jauh peran dari Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* dalam melakukan pemberdayaan di bidang penanggulangan bencana alam bagi anak-anak yatim dan kaum *dhuafa*, maka peneliti tertarik untuk menuangkan kajian ini dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Bagi Anak Yatim Dan *Dhuafa* Di Cabang Kota Cilegon.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manfaat sosial yang dihasilkan dari Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa* dalam Penanggulangan Bencana Alam Bagi Anak Yatim Dan *Dhuafa* Di Cabang Kota Cilegon?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Penanggulangan Bencana Alam Bagi Anak Yatim Dan *Dhuafa* Di Cabang Kota Cilegon?
3. Bagaimana hasil yang telah dicapai dalam Penanggulangan Bencana Alam Bagi Anak Yatim Dan *Dhuafa* Di Cabang Kota Cilegon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui manfaat sosial yang dihasilkan dari pemberdayaan sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan *dhuafa* di Cabang Kota Cilegon;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan *dhuafa* di Cabang Kota Cilegon; dan
3. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan sosial masyarakat dalam penanggulangan

bencana alam bagi anak yatim dan *dhuafa* di Cabang Kota Cilegon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam upaya pemberdayaan anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* di bidang penanggulangan bencana alam. Secara garis besar, penulis menyajikannya dalam dua hal, sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam khususnya dalam kajian fokus pembahasan pembedayaan masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa bahan pertimbangan bagi

pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk melakukan pemberdayaan di bidang penanggulangan bencana alam bagi anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* di Kota Cilegon.

a) Bagi Peneliti

Bagi Peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

b) Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep pemberdayaan pada anak yatim dan *dhuafa* dalam kerangka pemberdayaan penanggulangan bencana alam.

c) Bagi Akademisi

Bagi Akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri

(UIN) Sultan Maulana Hasanuddin khususnya dan Universitas lain di Indonesia pada umumnya.

### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkolerasi dalam melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Pada Program Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* (GDR) di Cabang Kota Cilegon” ini, Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berfikir dalam melakukan kajian.

Pertama, Skripsi, dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus Pada Produsen Tempe dan Tahu di Semanan, Kalideres)”. Oleh Fitri Maliani Nugraha Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PRIMKOPTI



Swakerta sebagai wadah produsen tempe dan tahu hanya menjalankan usaha dagang dan pembangunan fasilitas fisik, namun tidak merangkul produsen tempe dan tahu untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.<sup>12</sup>

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maliani Nugraha dengan penelitian ini terletak pada subjek dan objek pemberdayaan serta konteks atau substansi program pemberdayaan yang diberikan, dimana dalam penelitian tersebut subjek atau pelaku pemberdayaan adalah pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan dalam penelitian ini pelaku pemberdayaan adalah lembaga sosial non-pemerintah yakni Griya Yatim dan *Dhuafa* Cabang Cilegon. Objek pemberdayaan dalam penelitian sebelumnya adalah pengusaha UMKM, sementara dalam penelitian ini objeknya adalah anak yatim dan kaum *dhuafa*. Selanjutnya substansi

---

<sup>12</sup>Fitri Maliani Nugraha, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus Pada Produsen Tempe dan Tahu di Semanan, Kalideres)", (*Skripsi* Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).

program pemberdayaan dalam penelitian sebelumnya menyangkut pemberdayaan dalam bidang UMKM, berbeda dengan penelitian ini yang berkaitan dengan pemberdayaan pada bidang penanggulangan bencana alam.

Kedua, Jurnal, dengan judul “Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo”. Oleh Derry Ahmad Rizal Pegawai Pemerintah Sub Bidang Program dan Informasi Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2017). Riset ini melahirkan beberapa temuan menarik, antara lain kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada kelompok tani Tri Tunggal dengan pendekatan penyuluhan, pendampingan dan pemasaran hasil produksi pertanian. Sebagai dasarnya, regulasi Perda menjadi acuan bagi Pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Derry Ahmad Rizal, “Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2017) Sub Bidang Program dan Informasi Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, h. 344.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Derry Ahmad Rizal dengan penelitian ini terletak pada subjek dan objek pemberdayaan serta konteks atau substansi program pemberdayaan yang diberikan, dimana dalam penelitian tersebut subjek atau pelaku pemberdayaan adalah pihak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini pelaku pemberdayaan adalah lembaga sosial non-pemerintah yakni Griya Yatim dan *Dhuafa* Cabang Cilegon. Objek pemberdayaan dalam penelitian sebelumnya adalah pengusaha bidang pertanian dan para petani, sementara dalam penelitian ini objeknya adalah anak yatim dan kaum *dhuafa*. Selanjutnya substansi program pemberdayaan dalam penelitian sebelumnya menyangkut pemberdayaan dalam bidang usaha pertanian, berbeda dengan penelitian ini yang berkaitan dengan pemberdayaan pada bidang penanggulangan bencana alam.

Ketiga, Skripsi, dengan judul “Peran Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa* Dalam Pemberdayaan Kaum *Dhuafa* Melalui Pendidikan Keterampilan di Bekasi”. Oleh Fikri

Dzulkarnain, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014). Hasil penelitian ini adalah bahwa Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa* di Bekasi berperan sebagai mediator, fasilitator, pendidik sekaligus sebagai perwakilan bagi kaum *dhuafa* yang mengupayakan dapat membangun hidup mereka secara mandiri. Dengan demikian peran Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa* melalui pendidikan keterampilan adalah untuk mengupayakan kaum *dhuafa* memiliki kemandirian dalam membangun, mengembangkan dan membina kehidupannya secara responsif terhadap permasalahan sosial yang tengah dihadapinya. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Derry Ahmad Rizal dengan penelitian ini terletak pada substansi program pemberdayaan yang diberikan, dimana dalam penelitian tersebut substansi pemberdayaan yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya adalah pendidikan keterampilan bagi para kaum *dhuafa* dan anak-anak yatim di Kota Bekasi berbeda dengan penelitian ini yang berkaitan

dengan pemberdayaan pada bidang penanggulangan bencana alam.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian pemberdayaan sosial kemasyarakatan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam bidang penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan kaum *dhuafa*, peneliti menemukan masalah bahwa cakupan untuk dapat mengakomodir anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* di Kota Cilegon untuk memperoleh pemberdayaan dalam bidang penanggulangan bencana alam masih terbatas, maka atas permasalahan tersebut Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon harus melakukan terobosan dan inovasi untuk dapat memberdayakan anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* melalui pendekatan dan sosialisasi kepada calon dermawan bahwa lembaga sosial tersebut memiliki integritas dan kredibilitas dalam melaksanakan dan mengemban misi mulia

---

<sup>14</sup> Fikri Dzulkarnain, “Peran Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Dalam Pemberdayaan Kaum Dhuafa Melalui Pendidikan Keterampilan di Bekasi”, (*Skripsi*, Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

untuk melakukan pemberdayaan sosial khususnya bagi anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* di bidang penanggulangan bencana alam.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti upaya pemberdayaan sosial kemasyarakatan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam bidang penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan kaum *dhuafa*, maka dibuatlah kerangka pemikiran dan asumsi dasar yang merupakan alur berfikir peneliti. Asumsi dasar merupakan suatu persepsi awal dari seorang peneliti terhadap objek yang ditelitinya. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki asumsi tentang pelaksanaan pemberdayaan sosial kemasyarakatan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam bidang penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan kaum *dhuafa*. Kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam bidang penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan kaum *dhuafa* hanya menjadi sebuah rutinitas biasa yang belum

memiliki pemanfaatan potensi yang jitu untuk dikembangkan secara serius.

#### 1. Pemberdayaan

Tanggung jawab manusia sebagai anggota suatu kelembagaan pemerintahan maupun swasta sebenarnya bukanlah berkehendak atau dengan kata lain melemahkan pemberdayaan, melainkan lebih memperkuat agar tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah kelembagaan dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aspek utama daripada pemberdayaan adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang perlu dipertanggungjawabkan baik kepada atasan atau pimpinan pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan sumber daya manusia memang senantiasa diiringi keinginan-keinginan dengan disertai adanya kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga dapat mencapai keberhasilan puncak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi manusia yang tidak sadar dalam rangka

mengurangi kelemahan yang dimilikinya dan berusaha mengganti kekuatan dari kelemahan yang dimilikinya tersebut, jika tidak melakukan seperti itu berarti keberdayaan pada dirinya tidak ada.<sup>15</sup>

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.<sup>16</sup>

Konsep pemberdayaan yang telah timbul dalam kondisi masyarakat sosial, mengindikasikan terjadinya *gap* yang cukup jauh antara pihak yang berdaya dengan pihak

---

<sup>15</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 239-240.

<sup>16</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 48.



yang tidak atau belum berdaya. Konsekuensi logis atas hal tersebut adalah bahwa maraknya program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara independen bukan tolok ukur bagi keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan, melainkan hanya suatu implikasi atas terjadinya suatu *gap* antara pihak yang berdaya dengan pihak yang tidak atau belum memiliki daya. Sehingga, aktivitas pemberdayaan hanyalah suatu rutinitas menanggulangi persoalan *gap* yang terjadi di dalam lingkungan sosial masyarakat.

Keterwujudan pemberdayaan manusia adalah sangat bergantung pada keseriusan melakukan berbagai kegiatan khususnya kegiatan yang dapat melahirkan kemampuan dan kekuatan dalam diri masing-masing, karena dengan kemampuan mengelompokkan kegiatan baik berdasarkan dengan fungsi (*function*), wilayah (*territory*), produksi (*product*) dan sebagainya akan menciptakan kekuatan dalam diri masing-masing karena proses semacam itu merupakan

bagian dari pada pembelajaran.<sup>17</sup> Implementasi fungsi dari setiap individu dilakukan secara profesional, selanjutnya dapat menyesuaikan dengan keadaan alam dimana fungsi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seluruh daya yang sesuai, maka hasil tersebut akan tercapai secara maksimal dan setiap individu yang melaksanakannya akan merasa senang atas kesuksesannya (melaksanakan pemberdayaan) tersebut.

Konsep pemberdayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penggunaan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk disalurkan kepada orang lain yang belum atau tidak memiliki kekuasaan apapun. Paradigma tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anwas dalam bukunya, dimana :

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan,

---

<sup>17</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan...*, h. 240.

potensi atau keinginan orang lain. dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.<sup>18</sup>

Konsep yang menjadi fokus dalam kajian pemberdayaan sebagaimana disebutkan oleh Anwas tersebut adalah mengenai peralihan kekuasaan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkuasa kepada seseorang atau sekelompok orang yang tidak atau belum memiliki kuasa. Sehingga pemberdayaan secara teori dapat mengentaskan seluruh *gap* yang tercipta akibat ketimpangan kekuasaan antar individu. Hal ini tentu merupakan suatu gagasan yang nampak ideal dalam struktur kehidupan sosial masyarakat.

Konsep pemberdayaan yang saat ini populer di tengah masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut Suharto, pembangunan kesejahteraan sosial sendiri merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan

---

<sup>18</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 48.

sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik komprehensif, dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan konsep sebagaimana dikemukakan oleh Suharto dalam deskripsi di atas, maka pemberdayaan sesungguhnya memiliki agenda penting dalam mensejahterakan masyarakat kelas menengah ke bawah hingga masyarakat bawah. Dalam konteks ini tentu diharapkan dapat timbul *multiplier effect* yang dapat secara beruntun timbul atas eksekusi yang ditimbulkan oleh kegiatan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan definisi pemberdayaan itu sendiri yang menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang atau

---

<sup>19</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, h. 35.

pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.<sup>20</sup>

Pada dasarnya pemberdayaan memang ditujukan untuk memberikan akses sebesar-besarnya kepada kesejahteraan untuk menjadi suatu patokan bagi tujuan pemberdayaan secara komprehensif. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena ketika kesejahteraan telah hadir dalam suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat, maka dengan sendirinya pemberdayaan telah terwujud. Sehingga pada akhirnya pemberdayaan akan menemukan jalannya sendiri untuk menyebar dan semakin memperluas jaringannya dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat tertentu.

Pemberdayaan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, bukan tanpa alasan karena pemberdayaan sendiri merupakan suatu konsep mengenai peralihan kekuasaan yang hanya dapat dimiliki dan dialihkan

---

<sup>20</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 48.

saja oleh manusia (di luar konsepsi ketuhanan). Dalam hal ini, manusia sangat bergantung pada segala bentuk aspek ekonomi yang menyertainya. Menurut Munir, pengembangan sumber daya manusia dari perspektif ekonomi memiliki tiga tingkatan perkembangan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Masyarakat pra industri (masyarakat pertanian tradisional atau pra modern). Pada masyarakat demikian, kehidupan ekonomi berupa pertanian tradisional yang belum mengenal alat-alat pertanian ilmiah dan teknologi traktor dan pupuk;
2. Masyarakat industri (masyarakat modern) yang berkembang sejak abad ke-18, ditandai dengan revolusi industri. Sumber utama kehidupan ekonomi adalah industri yang menggunakan mesin-mesin sebagai hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan
3. Masyarakat pasca industri (masyarakat informasi atau masyarakat pasca modern). Pada masyarakat demikian, sumber utama kehidupan ekonomi adalah informasi dan

jasa. Jaringan informasi dan teknologi canggih menjadi semakin kompleks dan global.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada beberapa pendapat ahli mengenai pemberdayaan yang telah Peneliti sajikan dalam deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya memberikan kekuatan dari pihak yang berdaya kepada pihak yang tidak atau belum berdaya sebagai bagian dari upaya untuk menyeimbangkan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pemberdayaan juga merupakan suatu tahapan dalam meminimalisir *gap* atau kesenjangan antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Sehingga dapat tercipta suatu harmonisasi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

## 2. Yatim dan *Dhuafa*

Eksistensi kelas masyarakat marjinal yang ada di Kota Cilegon salah satunya adalah berasal dari anak-anak yatim dan kaum *dhuafa*. Disadari ataupun tidak, keberadaan

---

<sup>21</sup>Misbahul Munir, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren), h. 111.

golongan masyarakat tersebut tentu memberikan dinamika tersendiri bagi tatanan kehidupan sosial di Indonesia pada umumnya dan Kota Cilegon khususnya. Pemberdayaan kepada golongan yatim dan *dhuafa* mutlak diberikan karena mereka pada hakikatnya membutuhkan uluran tangan dari para dermawan guna meningkatkan taraf hidupnya agar mampu hidup secara independen. Sehingga independensi tersebut dapat memberikan akses bagi kaum yatim dan *dhuafa* untuk hidup layak sebagaimana kelas masyarakat menengah hingga menengah atas. Selain itu juga, anak-anak yatim *dhuafa* memiliki potensi sama baiknya dengan kelas masyarakat menengah dan menengah atas untuk berkembang secara baik.

Keberadaan anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* yang membutuhkan pertolongan dari sesama manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan secara langsung oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (83) dimana :



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang (Q.S. Al-Baqarah: 83).<sup>22</sup>

Berdasarkan pada ayat tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak hanya memerintahkan manusia untuk berbuat baik hanya kepada kedua orang tua saja melainkan juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang dikategorikan sebagai kaum *dhuafa*. Bukan tanpa alasan, yatim dan *dhuafa* memang memiliki tingkat kompleksitas hidup yang lebih rumit ketimbang manusia pada umumnya. Sehingga wajar apabila mereka memperoleh *privillage*

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 12.

berupa pemberian bantuan dari golongan masyarakat mampu yang dari segala aspek kehidupan jauh lebih unggul ketimbang yatim dan *dhuafa*.

Sebagai sosok yang tidak memiliki orang tua laki-laki (ayah), yatim dipersepsikan sebagai golongan yang ringkih karena secara psikologis mereka tidak memiliki pengayom utama atau tulang punggung keluarga yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh aspek kehidupannya. Dengan kata lain, yatim membutuhkan lebih banyak perhatian agar kehidupannya menjadi lebih baik. Sehingga, anak-anak yatim dapat hidup normal sebagaimana kehidupan yang dijalani oleh anak-anak pada umumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yatim merupakan orang yang tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati).<sup>23</sup> Artinya merujuk pada definisi tersebut yatim sudah tidak dapat lagi berinteraksi dengan salah seorang dari orang tua yang dimilikinya. Sehingga

---

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Yatim*, Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/yatim>, diakses pada 16 September 2019 (12.24 WIB).

untuk menjalani kehidupan sebagaimana biasanya akan terasa lebih berat dari manusia pada umumnya, sehingga mereka layak memperoleh bantuan dari pihak-pihak lain yang peduli dengan keadaannya.

Mengacu pada definisi tersebut, maka yatim yang notabene merupakan salah satu golongan masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial cukup riskan apabila tidak diberikan kepedulian oleh sesama agar kehidupannya berkembang. Untuk itu segenap komponen masyarakat lain yang cukup beruntung perlu melakukan upaya-upaya pemberdayaan agar yatim mampu hidup secara mandiri. Apabila kemandirian yatim telah terwujud, maka kondusifitas hidup yang ada di tengah lingkungan sosial dapat terwujud pula secara baik.

Sementara itu *dhuafa* memiliki makna orang-orang yang lemah (ekonominya dan sebagainya), dalam literasi islam *dhuafa* adalah orang-orang yang secara kemampuan hidup memiliki berbagai kekurangan untuk setidaknya mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Berdasarkan

konsep tersebut, *dhuafa* harus dilindungi dan diayomi oleh golongan masyarakat mampu agar kehidupannya lebih baik. Perlindungan dan pengayoman itu sendiri dapat berupa pemberdayaan kepada *dhuafa* agar mereka tidak terjerumus dalam kehidupan yang buruk seperti melakukan tindakan kriminal karena terpaksa dan lain sebagainya.

Mengacu pada definisi-definisi mengenai yatim dan *dhuafa*, yang telah Penulis sajikan dalam uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yatim dan *dhuafa* merupakan kelas atau golongan masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan hidup yang lebih kompleks ketimbang individu lainnya. Yatim dan *dhuafa* yang hidup di tengah eksistensi tatanan kehidupan sosial, juga memiliki kesempatan yang sama dalam aksesibilitasnya untuk hidup secara layak dan mendapat semacam *privillage* agar hidupnya berkembang dan secara perlahan mengentaskan seluruh persoalan yang menyertainya.

3. Pencegahan, Penanggulangan dan Rekonsiliasi Pasca Bencana Alam

Bencana alam merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diprediksi oleh manusia karena hal tersebut datang secara langsung dari fenomena alam yang terjadi di suatu wilayah. Bencana memiliki dampak destruktif yang mampu membuat tatanan kehidupan sosial menjadi rusak akibat kekuatannya yang masiv. Untuk itu, manusia melakukan berbagai cara guna mengantisipasi dan meminimalisir bencana alam yang berpotensi merusak tatanan kehidupannya baik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan spiritualisme.

Pemberdayaan masyarakat di daerah bencana diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat baik sebelum bencana (*pra*), pada saat terjadi bencana (*during*) dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadi bencana (*pasca*). Pemberdayaan sebelum bencana merupakan upaya penyadaran kepada individu dan masyarakat akan bahaya bencana. Bencana alam dapat terjadi kapan pun dan dimana pun. Yang sangat perlu ditumbuhkan adalah kesadaran kritis dari individu dan

masyarakat terhadap bahaya bencana, serta kesadaran bahwa pada diri setiap manusia memiliki potensi untuk meminimalisir risiko bencana.<sup>24</sup>

Apabila bencana alam terjadi, masyarakat diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya tanpa harus menunggu bantuan dari pihak lain, sehingga korban dan kerugian dari terjadinya bencana tersebut dapat diminimalisir. Individu dan masyarakat juga dapat pula berpartisipasi secara aktif dalam situasi bencana sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pengalaman para relawan ketika bencana terjadi seringkali masyarakat sepenuhnya mengandalkan relawan. Misalnya, di tempat pengungsian, masyarakat hanya duduk berdiam diri. Aktivitas di pengungsian seperti membantu evakuasi korban yang luka, menyiapkan dapur umum, menolong pengobatan, menyiapkan kakus dan lain sebagainya sangat bergantung pada relawan. Para pengungsi korban bencana hanya berdiam diri di barak pengungsian.

---

<sup>24</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 136.

Akibatnya pengungsi ini menjadi cepat jenuh, stres, bahkan timbul berbagai penyakit lainnya. Padahal aktivitas seperti memasak di dapur umum, membantu pengobatan, membantu evakuasi korban luka dan kegiatan lainnya dapat dilakukan oleh para pengungsi bersama-sama dengan petugas dan para relawan.<sup>25</sup>

Pada dasarnya setiap kejadian bencana alam apabila ditangani secara baik maka akan dapat mengurangi risiko dampak yang dihasilkan oleh bencana itu sendiri. Namun demikian, kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai bencana alam kerap membuat dampak dari bencana alam tersebut menjadi semakin buruk. Untuk itu, segenap pihak yang berkepentingan dalam penanganan bencana alam harus lebih fokus dalam hal memberikan edukasi atau langkah-langkah strategis meminimalisir bencana, ketimbang melakukan aksi-aksi penanganan bencana yang tengah berlangsung karena upaya preventif lebih memiliki nilai yang positif dalam penanganan bencana.

---

<sup>25</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 137.

Pemberdayaan di daerah pengungsian yang terdampak bencana juga dapat menciptakan berbagai aktivitas yang dapat membuat korban bencana aktif melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas. Kegiatan ini dapat diciptakan mulai dari kegiatan ringan sampai dengan kegiatan yang bersifat menghibur, tujuannya adalah membangkitkan sikap dan mental para korban bencana, beberapa kegiatan pelatihan praktis juga dapat menjadi alternatif opsi kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya pelatihan pertolongan pertama yang sangat penting bagi pengurangan penderitaan korban dan hasilnya dapat langsung diterapkan untuk menolong para korban, bagi kaum yatim dan *dhuafa* dapat diberikan pelatihan-pelatihan edukatif yang dapat secara langsung memberikan dampak positif bagi korban bencana alam. Sementara itu untuk ibu-ibu dapat diberikan pelatihan membuat masakan di dapur darurat untuk para korban bencana atau relawan yang membantu pada saat terjadinya bencana. Begitupun kegiatan pelatihan dan aktivitas lainnya banyak yang dapat



dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Bentuk pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan dan keterampilan, tetapi juga akan meningkatkan semangat hidup dan mentalitas para korban bencana. Walaupun menghadapi bencana, mereka tetap semangat untuk hidup dan bangkit kembali menyongsong masa depan yang lebih cerah.<sup>26</sup>

Pemberdayaan masyarakat golongan yatim dan *dhuafa* di daerah bencana perlu diberikan perhatian secara khusus. Realitas yang nampak dari setiap kejadian bencana alam adalah bahwa seringkali bencana mengakibatkan timbulnya yatim dan *dhuafa* baru. Artinya bencana alam menambah peluang untuk timbulnya golongan yatim dan *dhuafa* akibat kehilangan keluarga (yatim) dan atau harta benda yang berharga (*dhuafa*). Mereka ini dapat dikategorikan sebagai kelompok yang rentan karena kondisi secara finansial maupun psikis relatif lemah. Pada akhirnya kelompok tersebut perlu diberikan pemahaman tentang

---

<sup>26</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 137.

bahaya bencana yang dapat terjadi kapan saja. Dalam konteks ini, mereka perlu dibekali cara-cara penyelamatan, termasuk bagaimana cara-cara yang perlu dilakukan jika perlu bantuan pihak lain.<sup>27</sup>

Terjadinya suatu bencana alam memang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial baru yang dapat menjadi gangguan dalam tatanan kehidupan sosial. Namun demikian, hal tersebut tentu memiliki berbagai opsi alternatif guna meminimalisir dampak negatif yang justru dapat meluas seiring dengan berjalannya waktu. Untuk itu, menurut Anwas, keluarga yatim dan kaum *dhuafa* perlu diberikan pemahaman dan keterampilan dalam menolong ketika terjadi bencana termasuk upaya rehabilitas pasca terjadinya bencana alam.<sup>28</sup>

Pasca bencana, masyarakat didorong untuk mampu bahu membahu secara bergotong royong dalam membangun kembali sendi kehidupan pasca bencana. Dengan kegotong

---

<sup>27</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 138.

<sup>28</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 138.

royongan ini adalah kunci dalam membangun kembali pasca bencana. Pada tahap ini, masyarakat juga perlu ditumbuhkan kesadaran kritis untuk melakukan relokasi terhadap daerah yang dinilai bahaya laten untuk ditinggali lagi. Misalnya pemukiman di atas bukit dengan gunung berapi, pantai yang landai rawan tsunami, bantaran sungai dan tempat-tempat rawan lainnya. Tempat rawan tersebut tidak cocok untuk ditinggali secara permanen. Daerah bahaya mungkin dapat diubah menjadi wahana kegiatan ekonomi atau kegiatan pemberdayaan lainnya, misalnya tempat wisata, berjualan, tempat pengolahan dan usaha kecil, peternakan, perikanan dan kegiatan pemberdayaan lainnya. Relokasi memang sulit dilakukan, namun dengan kesadaran yang tepat akan mampu mengubah *mind set* masyarakat terutama untuk masa depan anak cucu mereka.<sup>29</sup>

Berdasarkan deskripsi dalam uraian yang telah Penulis paparkan sebelumnya, maka pencegahan, penanggulangan dan rekonsiliasi pasca bencana alam dapat

---

<sup>29</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 138.

dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengatasi dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh terjadinya suatu bencana. Pencegahan, penanggulangan dan rekonsiliasi pasca bencana alam membutuhkan keseriusan dari banyak pihak untuk dapat berhasil. Sehingga dalam pelaksanaannya, pencegahan, penanggulangan dan rekonsiliasi pasca bencana alam harus dilaksanakan secara teliti, konsisten dan berkelanjutan, agar tujuan utama dari hal tersebut dapat diwujudkan secara nyata.

## **G. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengenai pemberdayaan sosial kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan *Dhuafa* Di Cabang Kota Cilegon. Karena tujuan penelitian ini akan mengetahui sejauh mana yayasan tersebut dalam melaksanakan program kerjanya melalui kegiatan

pemberdayaan bidang penanggulangan bencana alam bagi anak-anak yatim dan kaum *dhuafa* di Kota Cilegon.

## **2) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dan keberadaan tempat tinggal dari anak yatim dan kaum *dhuafa* yang dinaungi oleh Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon. Latar belakang dipilihnya tempat penelitian adalah karena lokasi-lokasi tersebut merupakan destinasi akhir dari apa yang menjadi fokus dari penelitian ini.

## **3) Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain yaitu, wawancara dan kuesioner, apabila wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>30</sup>

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan melakukan interaksi tanya jawab secara langsung dengan pihak informan atau subjek penelitian guna memperoleh data. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian diantaranya adalah karyawan dan relawan Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa* Kota Cilegon serta anak yatim dan *dhuafa* yang memperoleh bantuan program pemberdayaan *griya disaster relief* oleh Yayasan Griya Yatim dan *Dhuafa* Kota Cilegon.

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-26, (Bandung : Alfabeta, 2018), h. 145

### c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi, maka perlu juga digunakan data tertulis yang telah ada dan mampu digunakan sebagai pendukung pencapaian tujuan penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan serta arsip pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini.

### d. Teknik Analisis Data

#### 1. Reduksi Data

Meliputi proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hasil dari wawancara informan yang dilakukan peneliti tentang mengenai pemberdayaan sosial kemasyarakatan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam bidang penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan kaum *dhuafa*, akan direduksi sebelum disajikan kedalam bentuk yang mudah dipahami.

Data yang ada akan diolah berdasarkan kebutuhan penelitian, dengan kata lain bahwa tidak seluruh data hasil wawancara akan disajikan kedalam sebuah pembahasan. Sehingga akan mempertegas, memperjelas lingkup permasalahan yang diteliti, membuang hal-hal yang tidak perlu sehingga memungkinkan kesimpulan akhir dibuat.<sup>31</sup>

## 2. Penyajian Data

Merupakan proses pengorganisasian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data hasil wawancara informan tentang mengenai pemberdayaan sosial kemasyarakatan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam bidang penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan kaum *dhuafa* direduksi, selanjutnya data disajikan dalam bentuk yang mudah

---

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 48-49.



dipahami untuk selanjutnya digunakan dalam proses penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan.<sup>32</sup>

### 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Merupakan penafsiran kesimpulan berdasarkan penyajian data. Secara ringkas teknik analisis yang dilakukan melalui proses mengatur, mengurutkan, mengelompokan, dan mengkategorikan menjadi urutan yang mudah dibaca dan dimengerti. Setelah data tentang mengenai pemberdayaan sosial kemasyarakatan Griya Yatim dan *Dhuafa Disaster Relief* Kota Cilegon dalam bidang penanggulangan bencana alam bagi anak yatim dan kaum *dhuafa* disajikan, maka penulis selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan guna menggambarkan secara keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Fikri, Dzulkarnain, *Peran Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa...*, h. 7.

<sup>33</sup>Bangun Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001), h. 129.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran tentang skripsi ini secara utuh, maka penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari :

### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bab satu ini, penulis menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini, kemudian persoalan dalam latar belakang tersebut diidentifikasi dan dilakukan pembatasan masalah agar konteks yang dibahas dalam penelitian ini tetap pada fokus yang hendak diteliti dirumuskan dalam rumusan masalah, selanjutnya dituangkan dalam tujuan penelitian yang hendak dicapai. Selanjutnya penulis menguraikan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dan disajikan pula sistematika penulisan guna memberikan panduan dan atau referensi bagi siapapun yang memiliki kepentingan dalam skripsi ini.

## **BAB II    Gambaran Umum Griya Yatim dan *Dhuafa***

Menguraikan tentang profil dari tempat yang ditentukan dalam penelitian ini, selain itu dijelaskan pula tentang program kerja yang dimiliki oleh Griya Yatim dan *Dhuafa* secara sistematis untuk memberikan gambaran secara umum tentang segala bentuk informasi mengenai lembaga yang dikaji dalam skripsi ini.

## **BAB III Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Bagi Anak Yatim dan *Dhuafa***

Pada bab ini, peneliti menggambarkan uraian tentang aktivitas program pemberdayaan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, kendala yang dihadapi, konsep yang digunakan dalam program pemberdayaan serta implementasi pemberdayaan yang dilakukan oleh Griya Yatim dan *Dhuafa* Cabang Kota Cilegon guna menunjang dan memberikan hasil yang relevan serta optimal untuk mendukung penelitian ini.

**BAB IV PEMBERDAYAAN SOSIAL  
KEMASYARAKATAN PADA PROGRAM GRIYA  
YATIM DAN *DHUAFA DISASTER RELIEF (GDR)*  
DI KOTA CILEGON**

Menguraikan tentang gambaran umum objek yang diteliti dalam skripsi ini, penjelasan mengenai data penelitian yang diperoleh dari proses penelitian, interpretasi dari hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

**BAB V Penutup**

Pada bab terakhir dalam penelitian ini akan disajikan suatu kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, untuk selanjutnya dibuat suatu rekomendasi berupa saran-saran yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam penelitian ini.